

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan merupakan suatu hal yang mempengaruhi kualitas hidup di masyarakat, terwujudnya lingkungan yang bersih salah satu faktor penunjang kesehatan makhluk hidup. Namun permasalahan saat ini untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tidak terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari ke hari semakin menumpuk, hal ini disebabkan karena penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai juga dengan aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang dilakukan juga terus meningkat, sehingga bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Untuk penanggulangan masalah ini peran dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi dan mengelola sampah. Selain peran masyarakat, peran Dinas Kebersihan sebagai salah satu instansi pemerintahan juga sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, suatu organisasi selalu berupaya untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Menurut Prawirosentono dalam Subekhi dan Jauhar (2012:193) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, hal ini dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma serta etika yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pegawai setidaknya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, beberapa faktor diantaranya yaitu, disiplin kerja dan sarana prasarana (Sedarmayanti dalam Widodo, 2015:133). Berkaitan dengan sarana prasarana tentu tidak terlepas dari kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan suatu organisasi.

Manajemen sarana prasarana merupakan ilmu yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sarana prasarana agar sarana prasarana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen sarana prasarana itu sendiri pada dasarnya meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana (Darmastuti dan Karwanto, 2014).

Selain manajemen sarana prasarana, disiplin kerja juga harus diperhatikan dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai hasil kinerja yang baik dan sesuai tujuan diperlukan sikap para pegawai harus disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena kedisiplinan yang baik mencerminkan

besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang atau sekelompok orang dalam mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2011:193).

Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab melayani masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kota Pemerintah Kota Pangkalpinang dan di revisi melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pemerintah Kota Pangkalpinang, Dinas Kebersihan dibagi kedalam beberapa bidang yaitu bidang kebersihan, bidang pengolahan sampah dan limbah tinja dan bidang sarana dan prasarana dan penyuluhan. Guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Dinas Kebersihan didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 430 pegawai, yang terbagi dalam tiga kategori pegawai yaitu pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 40 orang, pegawai harian tetap (PHT) sebanyak 1 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 3 orang Jasa Perkantoran, dan 356 orang yang menangani operasional kebersihan (pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah) serta 30 orang pegawai pengelolaan sampah.

Tabel I. 1 Data Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 orang
Pegawai Harian Tetap (PHT)	1 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa perkantoran	3 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengumpulan sampah	224 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengangkutan sampah	132 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengelolaan sampah	30 orang
Jumlah	430 orang

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016, Data diolah peneliti, 2016

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kota Pangkalpinang hal ini dilakukan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebersihan di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang yang didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peran dinas kebersihan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga para pegawai di instansi tersebut mampu bekerja secara optimal untuk meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti, kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya sampah yang belum dapat ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Belum optimalnya kinerja pegawai dapat dilihat dari laporan kinerja pelayanan pengangkutan sampah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.2 Laporan Kinerja Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2015

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Jumlah Timbulan Sampah Kota Pangkalpinang	449,095	405,11	508,5	400,35
Realisasi Capaian Pelayanan Sampah Yang Ditangani	363,967	324,57	445,64	355,45
% Realisasi	79,55%	81,6%	86,94%	88,78%

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah timbulan sampah Kota Pangkalpinang pada tahun 2012 mencapai 449,095 m³ sedangkan pencapaian pelayanan yang ditangani oleh dinas kebersihan sebesar 363,976 m³ atau 79,55%. Pada tahun 2013 jumlah timbulan sampah kota mencapai 405,11 m³ namun pencapaian layanan sampah yang dapat ditangani hanya 324,57 m³ atau 81,6%. Dan pada tahun 2014 jumlah timbulan sampah Kota Pangkalpinang meningkat yakni sebesar 508,5 m³ sedangkan capaian pelayanan sampah yang ditangani oleh Dinas Kebersihan mencapai 445,64 m³ atau 86,94% kemudian pada tahun 2015, jumlah timbulan sampah kota sebesar 400,35 m³ tetapi hanya dapat ditangani Dinas Kebersihan sebesar 355,45 m³ atau 88,78%. Meskipun tingkat realisasi capaian pelayanan sampah yang ditangani setiap tahunnya meningkat tetapi tidak semua sampah yang dapat ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Selain itu, belum optimalnya kinerja pegawai juga terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan, salah satunya yaitu di Jalan Pabrik City belakang SDN 41 Kota Pangkalpinang, dimana sampah terlihat berserakan dan sudah memakan sebagian jalan, sepertinya sampah itu sudah berbulan-bulan lamanya dan tidak ada satupun pegawai dari Dinas Kebersihan Kota

Pangkalpinang yang melakukan pembersihan terhadap limbah masyarakat tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1 Sampah berserakan di Jalan Pabrik City belakang SDN 41 Kota Pangkalpinang



Sumber: Berita Bangka.com tanggal 10/08/2016

Belum optimalnya kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, peneliti duga disebabkan oleh manajemen sarana prasarana yang kurang baik, seperti beberapa penempatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang masih sulit di jangkau oleh masyarakat serta beberapa lokasi yang masih membutuhkan tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang pada bulan Oktober 2016, bahwa adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh dinas kebersihan, sehingga menghambat kegiatan pelayanan pengangkutan sampah yang menyebabkan kinerja pegawai belum optimal.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sarana prasarana kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu untuk armada

pengangkutan seperti *dump truck*, *arm roll*, mobil *sweeper*, mobil *pick Up*, mobil *pick Up Sweeping*, motor sampah, dan sepeda sampah sedangkan peralatan penunjang kebersihan lainnya seperti *buldozer*, *container*, *excavator*, TPA, jaring sampah, gerobak sampah, dan tempat sampah permanen, untuk data lebih jelas dapat dilihat pada tabel tentang peralatan operasional bidang kebersihan pengangkutan sampah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.3 Peralatan Operasional Bidang Kebersihan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil <i>Dump Truck</i> (Tahun 1993-2015)	21	Unit	3 unit rusak berat dan 5 unit telah melewati umur pakai kendaraan
2	Mobil <i>Arm Roll</i> (Tahun 1998-2013)	6	Unit	1 unit rusak berat dan 1 unit hampir melewati umur pakai
3	Mobil <i>Sweeper</i> (Tahun 2007)	1	Unit	
4	Mobil <i>Pick Up</i> (Tahun 2015)	1	Unit	
5	Mobil <i>Pick Up Sweeping</i>	1	Unit	
6	Motor Sampah Roda Tiga (Tahun 2005-2014)	50	Unit	5 unit rusak berat
7	Sepeda sampah	3	Unit	
8	Container (Tahun 2008-2015)	35	Unit	2 unit rusak
9	Bulldozer (Tahun 2006-2015)	2	Unit	
10	Excavator	1	Unit	
11	TPA Parit Enam	1	Unit	Luas 2,5 Ha
12	Jaring sampah	1	Lokasi	
13	Gerobak sampah (Tahun 2008-2015)	67	Unit	11 unit Rusak
14	Tempat sampah permanen (Tahun 2011-2014)	28	Unit	

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, didapatkan bahwa sebagian dari jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tersebut

dalam keadaan rusak berat dan sebagian juga sudah melewati masa pakai, akibatnya dapat mengurangi jumlah armada, sehingga dapat menyebabkan pengurangan kapasitas pengangkutan sampah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2016, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) permanen yang tersebar di 25 lokasi yang ada di Pangkalpinang, untuk data lebih jelas dapat dilihat pada tabel tentang data lokasi TPS Permanen tahun 2016 yang disediakan oleh Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Tabel I.4 Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen Tahun 2016

No	Alamat/Lokasi	Jumlah	Satuan	Volume (m ³)
1	Jl. Basuki Rahmat	13	Unit	58,5
2	Jl. Rasakunda Samping Sektor	1	Unit	4,5
3	Jl. Rasakunda	3	Unit	13,5
4	Terminal Girimaya	2	Unit	9
5	Jl. Yang Zubaidah Kp. Bintang	6	Unit	27
6	Depan SD Negeri 12	1	Unit	4,5
7	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah	3	Unit	13,5
8	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah Samping Dr. Ase	1	Unit	4,5
9	Jl. Depati Hamzah (Semabung)	3	Unit	13,5
10	Jalan Koba Depan Ruko BB Tower	2	Unit	9
11	Jl. Mentok	2	Unit	9
12	Dekat Jembatan Pelipur Samping Sungai	1	Unit	4,5
13	Jl. Samping Masjid Jamik Dekta Jembatan	1	Unit	4,5
14	Jl. A Rachman Siddiq	5	Unit	22,5
15	Jl. K.H. Abdull Hamid	2	Unit	9
16	Jl. Linggar Jati	4	Unit	18
17	Jl. Salendra	1	Unit	4,5
18	Jl. K.H. Abdullah Addari	7	Unit	31,5
19	Jl. A Yani Seputaran RSUD DKT	3	Unit	13,5
20	Jl. A Yani Depan Dealer Yamaha	1	Unit	4,5
21	J.L A Yani Depan Dealer Honda	1	Unit	4,5
22	Jl. Adyaksa Stie Pertiba	1	Unit	4,5
23	Dekat Lapangan Futsal Stie Pertiba	1	Unit	4,5
24	Jl. Adyaksa	1	Unit	4,5
25	Jl. Kejaksaan Seputaran Kompera	20	Unit	90
Total		86	Unit	387

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dalam melayani masyarakat menyediakan tempat pembuangan

sampah sementara (TPS) sebanyak 86 unit yang tersebar di 25 Lokasi sekitaran Pangkalpinang dengan menyediakan antara 1 – 20 unit TPS di masing-masing lokasi.

Kegiatan pengangkutan sampah itu sendiri, berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa pelayanan pengangkutan dilakukan oleh 24 mobil dengan masing – masing sopir mobil dibantu oleh kernet sebanyak 1 – 4 orang serta 45 motor sampah, yang melayani 117 lokasi yang ada di Pangkalpinang.

Kegiatan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA), berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Perencanaan Evaluasi dan Laporan pada bulan November 2016 bahwa pengangkutan dari TPS ke TPA masih dilakukan di sekitaran Pangkalpinang dan pelayanan pengangkutan sampah hanya di lakukan dua rit dalam sehari, dengan operasional jam kerja untuk *shift* pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan untuk *shift* siang dilakukan pukul 14.00 – 18.00 WIB.

Belum optimalnya kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang selain disebabkan oleh manajemen sarana prasarana yang kurang baik, peneliti duga juga disebabkan oleh disiplin kerja. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih ada pegawai di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yang datang dan pulang tidak tepat pada waktunya, dan ada juga pegawai yang belum waktu istirahat tetapi sudah istirahat, serta pada jam kerja ada beberapa pegawai masih sempat untuk melakukan aktivitas diluar kerja misalnya dengan menonton acara hiburan lewat komputer dan bercerita sesama pegawai pada saat jam kerja. Selain itu, untuk tingkat kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari data absensi pegawai.

Berikut adalah data absensi pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas bidang Penganggukutan Sampah) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Tabel I.3 Data Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas Bidang Pengangkutan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2015

Bulan	Absensi (Orang)				
	Sakit	Izin	Cuti	Dinas	Tanpa Keterangan
Januari	99	15	-	18	13
Februari	87	8	-	15	9
Maret	101	10	-	20	21
April	55	8	6	29	13
Mei	62	6	-	27	11
Juni	49	11	6	9	8
Juli	89	4	-	-	19
Agustus	67	9	-	18	22
September	37	-	-	8	10
Oktober	29	8	-	13	17
November	79	5	-	-	36
Desember	118	-	-	33	39
Jumlah	754	84	12	190	218

Sumber : Dinas kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016, Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel diatas, data absensi pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tahun 2015, dimana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah absensi pegawai sakit sebanyak 754 orang, pegawai izin sebanyak 84 orang, pegawai cuti sebanyak 12 orang, dan pegawai yang tidak hadir karena kegiatan dinas sebanyak 190 orang, serta pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 218 orang. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa kedisiplinan pegawai pada dinas kebersihan kota pangkalpinang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Uraian diatas, terlihat bahwa belum optimalnya kinerja pelayanan pada Dinas Kebersihan, diduga disebabkan oleh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja. Untuk meneliti lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti

lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja dalam menilai kinerja pegawai. Penelitian ini berjudul **“Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
2. Apakah manajemen sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
4. Apakah manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
5. Seberapa besar pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
2. Objek yang diteliti hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
3. Variabel yang diteliti hanya variabel manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen sarana prasarana terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas

(PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara parsial.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara simultan.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan menambah serta memperluas pengetahuan tentang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi dan informasi bacaan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dan instansi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan

pengambilan keputusan serta dalam melakukan kegiatan evaluasi penilaian manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dimasa yang akan datang sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai usulan penelitian ini, pembahasan dilakukan secara sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada, yaitu teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia, teori-teori tentang kinerja pegawai, teori-teori tentang manajemen sarana prasarana, teori tentang disiplin kerja, serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi

dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis yang di terapkan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di kemukakan tentang data yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain: gambaran umum tentang objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai langkah-langkah strategis yang dapat di lakukan untuk kemajuan organisasi serta saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN